

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Kualitas Instrumen dan Data

Uji kualitas data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. Asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Multikolinearitas dan uji Heteroskedastisitas.

1. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual dari model yang terbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. Suatu model yang baik adalah model yang memiliki varians dari setiap gangguan atau residualnya konstan. Dalam penelitian ini pengujian ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan variabel-variabel independen dengan nilai absolut residualnya (Gujarati, 2006).

Berdasarkan uji Glejser didapatkan nilai probabilitas untuk semua variabel bebas atau independen yaitu tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa adanya homokedastisitas antara variabel-variabel independen atau dengan kata lain terbebas dari heteroskedastisitas. Di bawah ini merupakan output hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser.

Tabel 5. 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Variabel | Koefisien | Probabilitas |
|-----------|-----------|--------------|
| C | 0,804745 | 0,9187 |
| LOG(JPM?) | 0,150058 | 0,7799 |
| GINI? | 1,091707 | 0,4195 |
| LOG(UMK?) | -0,115424 | 0,6124 |

Sumber : Lampiran

Dari data dapat dilihat bahwa nilai probabilitas tingkat jumlah penduduk miskin, rasio gini dan upah minimum kabupaten/kota masing-masing adalah 0,7799, 0,4195, 0,6124 > 0,05 sehingga terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan (kolerasi) yang signifikan di antara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi. Deteksi adanya multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan uji korelasi parsial antar variabel independen, yaitu dengan menguji koefisien korelasi antar variabel independen dengan ketentuan apabila nilai koefisien korelasi > 0,8 maka terdapat multikolinieritas sedangkan apabila nilai koefisien korelasi < 0,8 maka tidak terdapat multikolinieritas. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 5. 2
Hasil Uji Multikolinieritas

| Variabel | Nilai Koefisien Korelasi |
|-----------|--------------------------|
| LOG(JPM?) | 0,314579 |
| GINI? | 0,523248 |
| LOG(UMK?) | 0,349056 |

Sumber : Lampiran

Berdasarkan Tabel 5.2 diatas, setelah dilakukan pengujian korelasi parsial antar variabel independen secara bergantian didapatkan hasil bahwa pengujian korelasi variabel jumlah penduduk miskin, rasio gini dan upah minimum kabupaten/kota mempunyai nilai koefisien regresi $R^2 = 0,314579, 0,523248, 0,349056 < 0,8$. Nilai koefisien korelasi ketiga variabel independen lebih kecil dari 0,8, sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat adanya masalah multikolinieritas antar variabel independen.

B. Pemilihan Metode Pengujian Data Panel

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*.

Untuk memilih model pengujian yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan. Pertama, Uji Chow digunakan untuk menentukan model *fixed effect* atau *common effect* yang dipakai dalam estimasi. Kedua adalah Uji Hausman yang dipakai untuk menentukan model *fixed effect* atau model *random effect* yang digunakan. Ketiga yaitu Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara *common effect* atau *random effect*.

1. Uji Chow (Uji *Likelihood Ratio*)

Uji Chow merupakan pengujian untuk menentukan model *fixed effect* atau *common effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis uji Chow adalah :

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Jika *Probabilitas Cross-section Chi-Square* $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, jika *Probabilitas Cross-section Chi-Square* $< 0,05$ maka Hipotesis Nol ditolak dan H_1 diterima.

Hasil uji pemilihan model pengujian data panel menggunakan uji Chow adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 3
Hasil Uji Chow

| <i>Effects Test</i> | <i>Statistic</i> | <i>d.f.</i> | <i>Prob.</i> |
|---------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| <i>Cross-section F</i> | 302,134009 | (5,27) | 0,0000 |
| <i>Cross-section Chi-square</i> | 145,518722 | 5 | 0,0000 |

Sumber : Lampiran

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kedua nilai probabilitas *Cross Section F* dan *Cross Section Chi-Square* yaitu masing-masing bernilai sama 0,0000 lebih kecil dari *alpha* 0,05 sehingga menolak hipotesis nol. Maka berdasar pada uji Chow, model pengujian data panel yang terbaik adalah dengan menggunakan model *fixed effect* dibanding model *common effect*.

2. Uji Hausman

Uji hausman merupakan pengujian untuk menentukan penggunaan metode antara *random effect* atau *fixed effect*. Hipotesis uji Hausman adalah :

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Jika Probabilitas *Cross-section random* $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, jika Probabilitas *Cross-section random* $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil uji pemilihan model pengujian data panel menggunakan uji Hausman adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 4
Hasil Uji Hausman

| <i>Test Summary</i> | <i>Chi-Sq. Statistic</i> | <i>Chi-Sq. d.f.</i> | <i>Prob.</i> |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| <i>Cross-section random</i> | 0,486623 | 3 | 0,9218 |

Sumber : Lampiran

Berdasar tabel di atas, nilai probabilitas *cross section random* adalah 0,9218 lebih besar dari *alpha* 0,05 sehingga menerima hipotesis nol. Jadi menurut uji Hausman, model yang paling tepat digunakan untuk pengujian data panel adalah dengan *random effect model*.

Dari dua uji pemilihan model di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini model *Random Effect* lebih baik dibandingkan dengan

model *Fixed Effect*, sehingga harus melakukan pengujian selanjutnya yaitu (*LM Test*).

3. Uji Langrange Multiplier (LM)

Uji Langrange Multiplier merupakan pengujian untuk menentukan penggunaan metode antara *random effect* atau *common effect*. Hipotesis uji Langrange Multiplier adalah :

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Random Effect Model*

Jika Probabilitas *Breusch-Pagan* $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, jika Probabilitas *Breusch-Pagan* $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil uji pemilihan model pengujian data panel menggunakan uji Langrange Multiplier adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 5
Hasil Uji Langrange Multiplier

| <i>Null (no rand. effect)</i> | <i>Cross-section</i> | <i>Period</i> | <i>Both</i> |
|-------------------------------|----------------------|------------------|-------------|
| <i>Alternative</i> | <i>One-sided</i> | <i>One-sided</i> | |
| <i>Breusch-Pagan</i> | 85,29330 | 3,312317 | 88,60562 |
| | (0,0000) | (0,0688) | (0,0000) |

Sumber : Lampiran

Berdasarkan tabel di atas, nilai probabilitas *Breusch-Pagan* adalah 0,0000 lebih kecil dari *alpha* 0,05 sehingga menolak hipotesis nol. Jadi menurut uji *Langrange Multiplier*, model yang paling tepat digunakan untuk pengujian data panel adalah dengan *random effect model*.

Dari ketiga uji pemilihan model di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini model *Random Effect* lebih baik dibandingkan dengan model *Fixed Effect* dan *Common Effect*.

C. Hasil Estimasi Model Data Panel

Berdasarkan hasil pemilihan model terbaik yang telah dilakukan sebelumnya, didapat hasil bahwa model terbaik yang bisa digunakan dalam penelitian ini adalah *random effect*. Maka peneliti dalam penelitian ini melakukan estimasi dengan metode *Random Effect Model* dan hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 6
Hasil Regresi Data Panel Menggunakan *Random Effect Model*

| <i>Random Effects (Cross)</i> | Koefisien |
|-------------------------------|-----------|
| _PCTN—C | -0.054386 |
| _PNRG—C | 0.003646 |
| _MDN—C | 0.007344 |
| _MGTN—C | 0.027597 |
| _NGW—C | 0.023857 |
| _KMDN—C | -0.008059 |

Sumber : Lampiran

Dari tabel di atas dapat dibuat model analisa data panel untuk setiap *cross-section* yaitu kabupaten/kota di Eks Karesidenan Madiun persamaan umum regresi penelitian ini sebagai berikut :

$$IPM_{it} = \beta_{1i} + \beta_2 JPM_{it} + \beta_3 GINI_{it} + \beta_4 UMK_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

IPM : indeks pembangunan manusia

JPM : jumlah penduduk miskin

GINI : ketimpangan distribusi pendapatan

UMK : upah minimum kabupaten/kota

Dapat diuraikan interpretasi faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di setiap kabupaten/kota di Eks Karesidenan Madiun yaitu ditulis dengan model persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{IPM KAB PACITAN} = & (-0,054386) + 4,036891 + \\ & (-0,066035)*\text{JPM_KAB PACITAN}+ \\ & 0,101271*\text{GINI_KABPACITAN}+ \\ & 0,064961 *\text{UMK_KABPACITAN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{IPM KAB PONOROGO} = & 0,003646 + 4,036891+ \\ & (-0,066035)*\text{JPM_KAB PONOROGO} + \\ & 0,101271*\text{GINI_KAB PONOROGO} + \\ & 0,064961 *\text{UMK_KAB PONOROGO} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{IPM KAB MADIUN} = & 0,007344 + 4,036891 + \\ & (-0,066035)* \text{JPM_KAB MADIUN} + \\ & 0,101271*\text{GINI_KAB MADIUN} + \\ & 0,064961 *\text{UMK_KAB MADIUN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{IPM KAB MAGETAN} = & 0,027597 + 4,036891 + \\ & (-0,066035)* \text{JPM_KAB MAGETAN} + \\ & 0,101271*\text{GINI_KAB MAGETAN} + \\ & 0,064961 *\text{UMK_KAB MAGETAN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{IPM KAB NGAWI} = & 0,023857 + 4,036891 + \\ & (-0,066035)* \text{JPM_KAB MAGETAN} + \\ & 0,101271*\text{GINI_KAB MAGETAN} + \end{aligned}$$

$$0,064961 *UMK_KAB MAGETAN$$

$$IPM KOTA MADIUN= (-0,008059) + 4,036891 +$$

$$(-0,066035)*JPM_KOTA MADIUN +$$

$$0,101271*GINI_KOTA MADIUN +$$

$$0,064961 *UMK_KOTA MADIUN$$

Berdasarkan hasil persamaan uji statistik di atas terlihat bahwa daerah yang memberikan pengaruh paling besar terhadap indeks pembangunan manusia di Eks Karesidenan Madiun adalah Kabupaten Magetan yang memberikan pengaruh sebesar 0,027597, kemudian disusul Kabupaten Ngawi sebesar 0,023857, lalu Kabupaten Madiun yaitu sebesar 0,007344, Kabupaten Ponorogo sebesar 0,003646, Kota Madiun sebesar -0,008059 dan terakhir adalah Kabupaten Pacitan sebesar -0,054386.

D. Uji Statistik

Uji statistik dalam penelitian ini meliputi koefisien determinasi (R^2), uji signifikan bersama-sama (Uji-F-statistik) dan uji signifikan parameter individual (Uji t-statistik).

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil dalam arti mendekati nilai nol maka kemampuan variabel independen dalam variabel dependen cukup terbatas. Sebaliknya nilai yang mendekati

satu berarti variabel independen memberikan informasi dengan baik terhadap variabel dependen.

Dari hasil regresi model *random effect*, variabel bebas yaitu pengaruh jumlah penduduk miskin, rasio gini dan upah minimum kabupaten/kota terhadap indeks pembangunan manusia di Eks Karesidenan Madiun periode 2010-2015 diperoleh nilai koefisien determinasi *adjusted R²* sebesar 0,960287. Hal ini berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 96,03 persen di Eks Karesidenan Madiun. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 3,97 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

2. Uji F-statistik

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam penelitian secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi variabel dependen. Hasil estimasi dengan *random effect Model* diperoleh nilai probabilitas F-statistik sebesar 0.000000 dimana signifikan pada taraf signifikansi 5 persen artinya secara bersama-sama variabel independen yaitu jumlah penduduk miskin, rasio gini dan upah minimum kabupaten/kota berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia di Eks Karesidenan Madiun.

3. Uji t-statistik

Uji t-statistik bertujuan untuk melihat seberapa jauh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel

dependennya. Di bawah ini disajikan tabel t-statistik variabel independen jumlah penduduk miskin, rasio gini dan upah minimum kabupaten/kota di Eks Karesidenan Madiun tahun 2010-2015.

Tabel 5. 7
Hasil Uji T-Statistik

| Variabel | Koefisien | Probabilitas |
|-----------|-----------|--------------|
| C | 4.036891 | 0.0000 |
| LOG(JPM?) | -0.066035 | 0.0000 |
| GINI? | 0.101271 | 0.0012 |
| LOG(UMK?) | 0.064961 | 0.0000 |

Sumber : Lampiran

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa variabel jumlah penduduk miskin memiliki koefisien regresi sebesar -0.066035 dengan probabilitas sebesar 0.0000. Dengan menggunakan taraf nyata 5 persen maka variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Eks Karesidenan Madiun periode 2010-2015. Artinya kenaikan 1 persen jumlah penduduk miskin akan menurunkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,066035 persen.

Sementara untuk variabel rasio gini memiliki koefisien regresi senilai 0,101271 dengan tingkat probabilitasnya yaitu sebesar 0,0012. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel rasio gini berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Eks Karesidenan Madiun periode 2010-2015. Artinya kenaikan 1 satuan rasio gini akan menaikkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,101271 persen.

Hasil uji t-statistik untuk variabel upah minimum kabupaten/kota menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar 0,064961 dengan nilai

probabilitas sebesar 0.0000 yang signifikan dengan taraf nyata 5 persen. Dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Eks Karesidenan Madiun periode 2010-2015. Artinya kenaikan 1 persen upah minimum akan menaikkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,06496 persen.

E. Interpretasi Hasil Pengujian *Random Effect Model*

1. Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun Periode 2010-2015.

Jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Eks Karesidenan Madiun tergolong cukup besar, hal ini merupakan permasalahan bagi pembangunan manusia. Akar dari permasalahan kemiskinan di Indonesia yakni disebabkan oleh tingginya disparitas antar wilayah akibat tidak meratanya distribusi pendapatan, sehingga kesenjangan antara masyarakat miskin dan kaya di Indonesia semakin melebar.

Data dan fakta menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia sulit diatasi. Hal ini diperparah dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah masih mengutamakan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan. Dalam hal ini campur tangan pemerintah sangat menentukan karena hampir tidak mungkin bagi penduduk miskin ini untuk meningkat

kesejahteraannya dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Hal ini merupakan tanggung jawab negara seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 34 yang berbunyi: “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” (Ginting, 2008).

Sebenarnya berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan seperti: penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir dengan sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya (Prawoto, 2009). Strategi penanggulangan kemiskinan itu kesemuanya berorientasi pada material, sehingga keberlanjutannya bergantung dari ketersedian anggaran dana dari pemerintah pusat maupun daerah.

Masalah kemiskinan inilah yang membuat masyarakat tidak bisa mengeyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan untuk membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah kemiskinan membuat jutaan rakyat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan secara terbatas (Prawoto, 2009).

Pengaruh jumlah penduduk miskin berdasarkan uji statistik diperoleh hasil bahwa koefisien regresi jumlah penduduk miskin menunjukkan nilai sebesar -0.066035 , hal ini berarti bahwa jika jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 1 persen maka akan menurunkan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 0.066035 persen. Jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) dengan probabilitas sebesar 0.0000 persen. Hal itu berarti perubahan jumlah penduduk miskin mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Eks Karesidenan Madiun.

Hal ini berarti penelitian ini sejalan dengan penelitian Basuki dan Saptutyningsih (2016) dan Zamharir (2016) dimana variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan dan negatif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Kemiskinan dapat terlihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan diartikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat. Kemiskinan berdampak pada turunnya produktifitas sebagian masyarakat, turunnya produktifitas masyarakat berakibat pada bertambahnya orang miskin baru, dan pada gilirannya akan menurunkan indeks pembangunan manusia.

Sebaliknya dengan turunnya jumlah penduduk miskin, produktifitas akan meningkatkan dan akan menaikkan pendapatan yang

diterima. Sehingga kenaikan pendapatan ini dapat menyebabkan kenaikan akan kebutuhan dasar, kesempatan untuk meningkatkan tingkat pendidikan juga bertambah, tingkat kesehatan juga akan meningkat sehingga akan menaikkan standar hidup layak karena dengan turunnya jumlah penduduk miskin akan menaikkan daya beli masyarakat yang terlihat dari pengeluaran per kapita per tahun, sehingga indeks pembangunan manusia dapat meningkat.

Sesuai dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin yang cenderung turun dari tahun ke tahun di kabupaten/kota Eks Karesidenan Madiun akan meningkatkan produktifitas sehingga mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun.

2. Pengaruh Rasio Gini terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun Periode 2010-2015.

Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel rasio gini memiliki koefisien regresi senilai 0.101271, maka dapat disimpulkan apabila rasio gini naik sebesar 1 satuan akan mengakibatkan indeks pembangunan manusia naik sebesar 0.101271 persen. Hal ini berbeda dengan hipotesis yang telah dikemukakan diawal yang menyatakan bahwa rasio gini akan memiliki pola negatif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

Jika dilihat dari tingkat probabilitasnya, rasio gini berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dengan angka probabilitas sebesar 0.0012. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel rasio gini atau ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh signifikan terhadap terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Eks Karesidenan Madiun.

Kemudian apakah yang penyebab pola hubungan rasio gini dengan indeks pembangunan manusia yang bersifat positif sehingga berbeda dengan hipotesis dalam penelitian ini. Hubungan rasio gini yang berpola positif terhadap indeks pembangunan manusia ini berarti semakin tinggi rasio gini atau ketimpangan distribusi pendapatan akan mengakibatkan naiknya indeks pembangunan manusia, sebaliknya semakin rendah rasio gini atau ketimpangan distribusi pendapatan akan menurunkan indeks pembangunan manusia.

Meski penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan, hal ini sejalan dengan penelitian dari Restariyuni (2014) yang meneliti indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio gini juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal tersebut dapat terjadi walaupun apabila tingkat kesenjangan antar penduduk berpendapatan rendah dengan penduduk berpendapatan tinggi semakin melebar, namun pendapatan yang diterima penduduk berpendapatan rendah masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal lain yang

dapat menyebabkan hal tersebut dapat terjadi antar lain karena tingginya ketimpangan pembangunan antar wilayah, sehingga menyebabkan meningkatnya angka urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Hal yang sama juga dapat terjadi di wilayah Eks Karesidenan Madiun, pembangunan terlihat belum merata, pembangunan hanya berfokus di wilayah Kota Madiun, sedangkan proses pembangunan kabupaten lain di wilayah Eks Karesidenan Madiun masih belum optimal. Hal ini yang menyebabkan masyarakat memilih untuk melakukan urbanisasi atau bekerja di kota dengan harapan untuk meningkatkan pendapatannya. Meski hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena terjadi kenaikan pendapatan, tapi hal tersebut juga akan memperparah tingkat ketimpangan yang sudah ada.

Meskipun pendapatan yang diterima penduduk berpendapatan rendah tergolong kecil bukan berarti mereka tergolong penduduk miskin, karena pendapatan yang mereka terima lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan di kabupaten/kota Eks Karesidenan Madiun. Sedangkan dengan kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan oleh kenaikan pendapatan penduduk yang berpendapatan tinggi. Dengan kenaikan pendapatan penduduk yang berpendapatan tinggi inilah yang mendorong kenaikan indeks pembangunan manusia, karena dengan kenaikan pendapatan penduduk yang berpendapatan tinggi akan menyebabkan kenaikan standar hidup layak penduduk yang berpendapatan

tinggi, sehingga akan mendorong terjadinya kenaikan indeks pembangunan manusia.

Sebaliknya walaupun distribusi pendapatan semakin merata tetapi malah menurunkan indeks pembangunan manusia, hal ini disebabkan karena walaupun pemerataan pendapatan sudah baik namun belum tentu pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk tinggi. Rasio gini hanya mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau untuk mengukur pendapatan penduduk disuatu daerah itu merata atau timpang, rasio gini tidak mengukur seberapa tinggi tingkat pendapatan yang diterima penduduk dalam distribusi pendapatannya.

Tabel 5. 8

Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Madiun dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Kabupaten Pacitan | 13,96 | 15,53 | 17,19 | 19,09 | 21,09 |
| Kabupaten Ponorogo | 11,59 | 12,82 | 14,07 | 15,47 | 17,19 |
| Kabupaten Madiun | 13,68 | 15,22 | 16,81 | 18,59 | 20,52 |
| Kabupaten Magetan | 14,82 | 16,32 | 18,08 | 20,05 | 22,12 |
| Kabupaten Ngawi | 11,61 | 13,00 | 14,58 | 16,08 | 18,09 |
| Kota Madiun | 39,60 | 43,58 | 48,19 | 52,84 | 58,24 |
| Provinsi Jawa Timur | 29,61 | 32,77 | 36,04 | 39,88 | 43,50 |

Sumber: BPS Jatim, 2016

Dari tabel diatas terlihat data pendapatan per kapita tahun 2011-2015. Angka pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara umum disuatu wilayah. Meski pendapatan per kapita belum bisa menggambarkan secara riil pendapatan yang diterima masing-masing

penduduk namun pendapatan per kapita masih cukup relevan untuk mengetahui apakah secara rata-rata pendapatan masyarakat mengalami peningkatan atau tidak. Dari data diatas terlihat bahwa setiap tahun Provinsi Jawa Timur maupun kabupaten/kota di Eks Karesidenan Madiun selalu mengalami peningkatan pendapatan per kapita yang menunjukkan kenaikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Peningkatan indeks pembangunan manusia juga secara langsung terbukti menaikkan standar hidup layak masyarakat karena terjadi peningkatan daya beli oleh masyarakat, hal ini terbukti dari kenaikan pengeluaran per kapita dari tahun ke tahun dari seluruh kabupaten/kota di Eks Karesidenan Madiun.

Kenaikan pendapatan per kapita sebagai indikator untuk mengetahui secara rata-rata terjadi kenaikan pendapatan masyarakat atau tidak, dan terbukti bahwa terjadi kenaikan pendapatan per kapita yang cukup besar setiap tahun, yang menunjukkan bahwa secara rata-rata terjadi kenaikan pendapatan masyarakat secara umum. Sedangkan pengeluaran per kapita merupakan indikator untuk mengukur daya beli dan kualitas/standar hidup layak masyarakat melalui pengeluaran terhadap 96 jenis komoditas yang dihitung oleh BPS, dan terbukti bahwa terjadi kenaikan pengeluaran per kapita setiap tahun, yang menunjukkan terjadinya peningkatan daya beli dan kualitas/standar hidup masyarakat setiap tahunnya. Sedangkan garis kemiskinan merupakan batasan minimum pengeluaran yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu orang atau

rumah tangga termasuk miskin atau tidak. Terbukti juga bahwa terjadi garis kemiskinan setiap tahun mengalami kenaikan. Kenaikan pendapatan per kapita, pengeluaran per kapita dan garis kemiskinan yang terjadi setiap tahun. Dan kembali ke penjelasan sebelumnya bahwa rasio gini atau ketimpangan distribusi pendapatan hanya mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau untuk mengukur pendapatan penduduk disuatu daerah itu merata atau timpang, rasio gini tidak mengukur seberapa tinggi tingkat pendapatan yang diterima penduduk dalam distribusi pendapatannya. Jadi dengan rasio gini yang meningkat atau ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin tinggi belum tentu akan menaikkan jumlah penduduk miskin, hal ini terbukti walaupun garis kemiskinan selalu naik tapi selalu diimbangi oleh kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang bahkan lebih besar sehingga menaikkan pengeluaran per kapita yang secara langsung akan menaikkan daya beli dan standar hidup masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat, dan terjadi kenaikan pembangunan manusia.

Jadi kesimpulannya rasio gini atau tingkat ketimpangan distribusi pendapatan tidak mengukur seberapa besar tingkat pendapatan penduduk disuatu wilayah, hanya mengukur apakah pendapatan penduduk disuatu wilayah tersebut merata atau tidak. Dengan kata lain walaupun tingkat distribusi pendapatan penduduk semakin timpang, bukan berarti jumlah penduduk miskin bertambah, karena pendapatan penduduk yang berpenghasilan rendah masih lebih tinggi dari garis kemiskinan dan cukup

untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketimpangan yang terjadi bisa terjadi karena terjadinya kenaikan pendapatan penduduk yang berpenghasilan tinggi, bukan karena terjadi penurunan pendapatan penduduk yang berpenghasilan rendah. Dengan begitu maka kenaikan rasio gini, tidak akan menurunkan indeks pembangunan manusia malah bisa menaikkan indeks pembangunan manusia karena didorong oleh kenaikan standar hidup layak penduduk yang berpenghasilan tinggi atau faktor lain selain rasio gini.

3. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun Periode 2010-2015.

Pengaruh upah minimum kabupaten/kota berdasarkan uji statistik diperoleh hasil bahwa koefisien regresi upah minimum kabupaten/kota menunjukkan nilai sebesar 0.064961, hal ini berarti bahwa jika upah minimum kabupaten/kota meningkat sebesar 1 persen maka akan menaikkan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 0.064961 persen. Dengan probabilitas sebesar 0.0000, upah minimum kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan upah minimum kabupaten/kota mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Eks Karesidenan Madiun.

Kenaikan upah dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja. Pendapatan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan

hidup secara layak, dengan kenaikan upah kebutuhan hidup akan terpenuhi dengan lebih layak karena daya beli akan meningkat sehingga juga akan menaikkan tingkat kesejahteraan. Pertambahan pendapatan akan menaikkan pengeluaran konsumsi, tambahan konsumsi dapat berupa makanan, non makanan, pendidikan dan kesehatan. Sehingga terjadi kenaikan komponen-komponen pembentuk indeks pembangunan manusia yang terdiri dari indeks kesehatan yang diperoleh dari angka harapan hidup saat lahir. Hal ini terbukti karena terjadi kenaikan pada kualitas kesehatan penduduk, terjadi kenaikan angka harapan hidup saat lahir penduduk kabupaten/kota di Eks Karesidenan Madiun dalam lima tahun terakhir.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian Sari (2015) yang menunjukkan variabel upah minimum regional berpengaruh signifikan dan positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Demikian juga penelitian Zamharir (2016) menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan dan positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), artinya kenaikan upah akan meningkatkan kebutuhan hidup layak, sehingga standar hidup layak juga akan meningkat. Karena upah merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraanya. Upah minimum juga berfungsi untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, karena peningkatan upah minimum dapat mendorong pendapatan masyarakat miskin sehingga kemiskinan dapat dikurangi dan juga ketimpangan distribusi

pendapatan juga dapat dikurangi karena penduduk miskin mendapat kenaikan penghasilan. Yang terpenting, kenaikan upah dapat mendorong tingkat pendidikan, kesehatan, pendapatan dan standar hidup layak sehingga mendorong peningkatan IPM.